

Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi

Eli Budi Santoso¹, Agus Prasetyo², Lasando Lumban Gaol^{3*}

^{1,2,3}Universitas Terbuka, Indonesia

*Corresponding Author: lasando.lumban@ecampus.ut.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 15/06/2024
Diterima, 20/07/2024
Dipublikasi, 30/07/2024

Kata Kunci:

Tata Kelola Keuangan Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Informasi, Akuntabilitas

Keywords:

Public Financial Governance, Public Participation, Information Transparency, Accountability

Abstrak

Abstrak Tata kelola keuangan publik yang baik merupakan dasar penting bagi pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dan transparansi informasi memainkan peran krusial dalam memperkuat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Teori yang mendasari penelitian ini mencakup konsep partisipasi masyarakat dan transparansi informasi sebagai pilar utama tata kelola keuangan publik yang baik. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas pemerintah. Transparansi informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses data keuangan publik sehingga dapat memantau penggunaan dana dan mencegah korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Lampung Timur dengan subjek penelitian meliputi pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, perwakilan LSM, dan warga masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran di Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan signifikan, meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman teknis anggaran. Transparansi informasi melalui portal web pemkab Lampung Timur telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, meskipun akses informasi di daerah terpencil masih perlu diperbaiki. Partisipasi masyarakat dan transparansi informasi terbukti efektif dalam memperkuat tata kelola keuangan publik di Kabupaten Lampung Timur. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang proses penganggaran dan memperbaiki infrastruktur internet di daerah terpencil.

Abstract

Abstract: Good public financial governance is a fundamental basis for an effective and accountable government. In this context, public participation and information transparency play crucial roles in strengthening the accountability and efficiency of public financial management. The theory underlying this research includes the concepts of public participation and information transparency as the main pillars of good public financial governance. Active public participation in budgeting and oversight processes is expected to enhance the government's responsiveness and accountability. Information transparency allows the public to access financial data, enabling them to monitor fund usage and prevent corruption. This study uses a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The research location is Lampung Timur Regency, with research subjects comprising local government officials, DPRD members, NGO representatives, and community members. The results show that public participation in the budgeting process in Lampung Timur Regency has significantly increased, although there are still technical understanding barriers regarding the budget. Information transparency through the web portal Lampung Timur Regency has increased public trust in the local government, although access to information in remote areas still needs

improvement. Public participation and information transparency have proven effective in strengthening public financial governance in Lampung Timur Regency. However, further efforts are needed to improve public education on the budgeting process and enhance internet infrastructure in remote areas.

PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan publik yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya negara dikelola secara efisien dan efektif. Ini mencakup proses penganggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pemerintahan yang efektif membutuhkan tata kelola keuangan yang dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang baik, serta memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran. Menurut Liu & Mikesell (2014), “Tata kelola keuangan yang baik adalah fondasi dari pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan publik secara efektif”. Hal ini juga didukung oleh (Bovens et al., (2008) yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan publik. Banyak negara menghadapi tantangan dalam tata kelola keuangan publik, termasuk korupsi yang merajalela, inefisiensi dalam pengelolaan anggaran, dan kurangnya akuntabilitas pejabat publik. Korupsi dapat menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, sementara inefisiensi dan kurangnya akuntabilitas dapat menyebabkan penggunaan dana yang tidak optimal dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. La Porta et al., (2000) menyatakan bahwa “Korupsi dalam pemerintahan berdampak langsung pada efisiensi penggunaan sumber daya publik dan kepercayaan masyarakat”. Kaufmann et al., (2011) juga menekankan bahwa korupsi dan kurangnya akuntabilitas menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.

Partisipasi masyarakat dan transparansi informasi adalah dua komponen penting yang dapat memperkuat tata kelola keuangan publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan publik. Transparansi informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses data keuangan publik, sehingga mereka dapat memantau penggunaan dana dan mencegah korupsi. Menurut Fung, (2015), “Transparansi dan partisipasi masyarakat adalah alat yang efektif untuk memperkuat akuntabilitas dan responsivitas pemerintah”. (Fox & Fox, 2007) juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat tata kelola keuangan publik dengan cara memperluas keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut. Masyarakat yang terlibat aktif cenderung lebih kritis dan waspada terhadap penyalahgunaan dana publik. Bentuk-bentuk partisipasi bisa beragam, seperti anggaran partisipatif, di mana masyarakat langsung berkontribusi dalam menentukan prioritas pengeluaran daerah. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik Shah, (2005) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam penganggaran dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik.

Transparansi informasi memegang peranan kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik. Dengan keterbukaan informasi, pemerintah dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat. Aksesibilitas data keuangan memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk melakukan audit secara independen, mengidentifikasi inefisiensi, dan

mendeteksi korupsi lebih awal. Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, karena mereka mengetahui bahwa tindakan mereka diawasi oleh masyarakat luas. Selain itu, transparansi informasi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, karena warga memiliki akses ke informasi yang relevan dan dapat memberikan masukan yang berdasarkan fakta (Fung, 2015). Menurut Hood, (2012), transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang terjadinya korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dapat mempengaruhi tata kelola keuangan publik. Ini termasuk identifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan inisiatif partisipasi dan transparansi, serta dampaknya terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Menurut Fox & Fox (2007), "Transparansi dan partisipasi masyarakat secara signifikan dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah". Fung (2015) juga menekankan bahwa "keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik". Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. Ini mencakup analisis praktik terbaik dari berbagai negara atau daerah yang telah berhasil mengimplementasikan inisiatif tersebut, serta rekomendasi untuk strategi yang dapat diadaptasi oleh pemerintah lain. Menurut Shah (2005), "Partisipasi masyarakat yang terstruktur dan sistematis dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan anggaran". Bovens et al. (2008) menyarankan bahwa "penerapan mekanisme transparansi yang komprehensif adalah kunci untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas".

Banyak penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dalam tata kelola keuangan publik, namun banyak dari studi tersebut yang bersifat teoritis dan kurang dalam hal bukti empiris khususnya di konteks lokal seperti Kabupaten Lampung Timur. Contoh studi ini termasuk karya Bovens et al. (2008) dan Fung, (2015) yang lebih banyak berfokus pada konsep umum tanpa aplikasi spesifik ke daerah tertentu. Banyak literatur yang ada berfokus pada praktik terbaik global atau nasional tanpa menggali praktik terbaik di tingkat lokal atau daerah. Padahal, ada variasi yang signifikan dalam efektivitas inisiatif partisipasi dan transparansi yang diterapkan di berbagai konteks lokal. Studi seperti yang dilakukan oleh (Shah, 2005) mengkaji praktik terbaik di tingkat nasional atau internasional, tetapi tidak secara spesifik di tingkat lokal. Zen Munawar et al. (2023), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Ada kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. Banyak penelitian yang mengidentifikasi kebijakan yang ideal, tetapi sedikit yang mengeksplorasi tantangan praktis dan solusi implementasi di lapangan. Fox & Fox (2007) dan Kaufmann et al. (2011) menekankan pentingnya kebijakan tersebut, tetapi tidak mendalami bagaimana kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks yang berbeda. Penelitian ini akan menjadi salah satu yang pertama yang fokus secara khusus pada kontribusi partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dalam tata kelola keuangan publik di Kabupaten Lampung Timur. Dengan melakukan studi empiris di daerah ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya.

Tata kelola keuangan publik merujuk pada sistem dan proses yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Ini mencakup seluruh siklus keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pengumpulan pendapatan, alokasi sumber daya, pelaksanaan pengeluaran, hingga pelaporan dan audit keuangan. Tata kelola keuangan publik yang baik memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat (Natision et al., 2022).

Elemen utama tata kelola keuangan publik mencakup:

1. **Perencanaan Anggaran:** Melibatkan penentuan prioritas pengeluaran berdasarkan kebutuhan dan tujuan strategis negara, termasuk penyusunan anggaran tahunan (Nuryani & Firmansyah, 2020).
2. **Pengumpulan Pendapatan:** Melibatkan mekanisme pengumpulan pendapatan negara dari berbagai sumber seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya (Hartanti & Yuhertiana, 2018).
3. **Pelaksanaan Anggaran:** Mencakup implementasi rencana anggaran yang telah disusun, dengan pengawasan ketat untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan (Mudrifah, 2020).
4. **Pelaporan Keuangan:** Transparan dan akurat untuk memberikan gambaran jelas tentang penggunaan dana publik, termasuk laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen (Trimarstuti, 2019).
5. **Audit dan Pengawasan:** Evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan, membantu mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dana (Savitri et al., 2022).

Prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola keuangan publik mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi berarti menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu mengenai anggaran, pengeluaran, dan laporan keuangan kepada masyarakat. Menurut Faedlulloh & Wiyani (2019), transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan akuntabel. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan lembaga pengawas, membantu mencegah korupsi dan memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya (Natawibawa et al., 2019). Partisipasi masyarakat memungkinkan warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran dan pengeluaran, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat serta kepercayaan publik terhadap pemerintah (Baihaqi et al., 2023).

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk pengelolaan keuangan publik. Ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari konsultasi publik, penyusunan anggaran partisipatif, hingga pengawasan pelaksanaan anggaran. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai elemen kunci dalam demokrasi karena memungkinkan warga untuk menyampaikan pandangan dan preferensi mereka, serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah korupsi.

Teori partisipasi masyarakat mencakup Teori Partisipasi Arnstein dan Teori Demokrasi Partisipatif. Teori Partisipasi Arnstein mengklasifikasikan partisipasi masyarakat menjadi

delapan tingkat, dari non-partisipasi hingga kendali warga, menekankan pentingnya kekuasaan nyata bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan (Arnstein, 1969). Teori Demokrasi Partisipatif menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik adalah esensial untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat (Fung, 2015). Model partisipasi masyarakat dalam keuangan publik mencakup anggaran partisipatif, forum konsultasi publik, dan pengawasan masyarakat. Anggaran partisipatif memungkinkan masyarakat secara langsung terlibat dalam penyusunan anggaran publik, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik (Shah, 2005). Forum konsultasi publik adalah platform dialog antara pemerintah dan masyarakat mengenai isu-isu keuangan publik, meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas (Faedlulloh & Wiyani, 2019). Pengawasan masyarakat melibatkan warga dalam proses pengawasan penggunaan dana publik dan pelaksanaan proyek pemerintah, mencegah korupsi dan memastikan dana digunakan sesuai rencana (Hartanti & Yuhertiana, 2018).

Transparansi informasi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu mengenai keuangan publik, termasuk proses anggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Transparansi bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan dan diperlukan untuk memahami dan mengawasi tindakan pemerintah. Menurut Trimarstuti (2019), transparansi informasi adalah fondasi penting untuk menciptakan tata kelola yang baik dan mencegah korupsi dalam pengelolaan keuangan publik. Teori transparansi informasi mencakup Teori Agensi dan Teori Transparansi Demokratis. Teori Agensi menyoroiti hubungan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah), menekankan pentingnya transparansi informasi untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Teori Transparansi Demokratis menyatakan bahwa transparansi adalah prasyarat untuk demokrasi yang efektif, meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Fung, 2015).

Praktik transparansi informasi di sektor publik mencakup pelaporan keuangan yang terbuka, portal data terbuka, dan penggunaan teknologi informasi. Pelaporan keuangan yang terbuka membantu masyarakat memantau penggunaan dana publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah (Natawibawa et al., 2019). Portal data terbuka memungkinkan akses mudah dan cepat ke informasi yang relevan, seperti Open Data Jakarta yang memenuhi standar Transparansi 2.0 (Faedlulloh & Wiyani, 2019). Penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Indonesia dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Suryanto, 2019).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dan transparansi informasi mempengaruhi tata kelola keuangan publik di Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait isu ini. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung,

Indonesia. Lokasi ini dipilih karena adanya inisiatif lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dalam pengelolaan keuangan publik.

Subjek penelitian mencakup berbagai pemangku kepentingan dalam tata kelola keuangan publik di Kabupaten Lampung Timur, termasuk pejabat pemerintah daerah (pejabat bagian keuangan, pejabat bagian anggaran, auditor APIP), anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), perwakilan LSM dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam isu tata kelola dan transparansi, serta warga masyarakat yang berpartisipasi dalam proses anggaran partisipatif atau memiliki pengalaman dalam mengakses informasi keuangan publik. Data dikumpulkan melalui beberapa metode kualitatif, yaitu wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, anggota DPRD, perwakilan LSM, dan warga masyarakat untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka tentang partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dalam tata kelola keuangan publik. Wawancara ini menggunakan panduan semi-terstruktur untuk memastikan semua topik relevan tercakup. Observasi partisipatif dilakukan dalam pertemuan-pertemuan publik atau kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat, untuk memahami konteks dan proses yang terjadi dalam praktik. Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen resmi pemerintah, seperti laporan keuangan, laporan audit, anggaran daerah, serta laporan dari LSM yang berkaitan dengan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*). Proses analisis meliputi beberapa tahap: transkripsi data wawancara dan FGD yang direkam menjadi teks tertulis, pembacaan mendalam transkrip untuk memahami keseluruhan data, pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang muncul dari data, kategorisasi dengan mengelompokkan kode-kode serupa ke dalam kategori yang lebih besar, penyusunan tema utama yang mencerminkan isu-isu kunci terkait partisipasi masyarakat dan transparansi informasi, serta interpretasi yang menyusun narasi untuk menggambarkan temuan penelitian dan menghubungkannya dengan teori dan literatur yang relevan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pejabat pemerintah dan masyarakat. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian. Responden diberikan informasi lengkap tentang tujuan penelitian, dan persetujuan mereka diperoleh sebelum data dikumpulkan. Kerahasiaan dan anonimitas responden dijaga, dan data yang dikumpulkan digunakan hanya untuk tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Deskripsi Informan

No	Informan	Deskripsi Informan
1	Pejabat Pemerintah Daerah	Pejabat di bidang keuangan Kabupaten Lampung Timur, bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Memiliki wawasan mendalam tentang proses penganggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan.

No	Informan	Deskripsi Informan
2	Pejabat Pemerintah Daerah	Pejabat di bagian anggaran, berperan dalam penyusunan dan implementasi anggaran daerah. Berinteraksi langsung dengan berbagai unit kerja dalam proses anggaran.
3	Auditor Internal Pemerintah Daerah (APIP)	Auditor yang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Timur, bertugas mengaudit dan mengawasi penggunaan dana publik untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efisiensi penggunaan anggaran.
4	Anggota DPRD	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur yang terlibat dalam pengawasan anggaran dan kebijakan keuangan. Berperan dalam menyetujui dan memantau implementasi anggaran.
5	Perwakilan LSM (Transparansi dan Akuntabilitas)	Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Terlibat dalam advokasi dan monitoring kebijakan keuangan daerah.
6	Perwakilan LSM (Partisipasi Masyarakat)	Anggota LSM yang bekerja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk penganggaran partisipatif.
7	Warga Masyarakat (Peserta Anggaran Partisipatif)	Warga yang telah berpartisipasi dalam program anggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Memiliki pengalaman dalam menyampaikan usulan dan memantau pelaksanaan proyek yang didanai oleh anggaran partisipatif.
8	Warga Masyarakat (Penerima Manfaat)	Warga yang merupakan penerima manfaat dari program-program pemerintah yang didanai oleh anggaran daerah. Dapat memberikan perspektif tentang dampak program dan transparansi informasi terkait penggunaan dana publik.
9	Staf Teknologi Informasi Pemerintah Daerah	Staf IT yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan portal data terbuka dan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Memiliki wawasan teknis tentang bagaimana informasi keuangan dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat.
10	Akademisi (Ahli Tata Kelola Keuangan Publik)	Dosen atau peneliti di universitas lokal yang memiliki keahlian dalam tata kelola keuangan publik dan telah melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dan transparansi informasi di sektor publik.

Tabel 2. Analisis Dokumen

No	Dokumen	Deskripsi Dokumen	Kutipan Dokumen
1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	UU ini mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran melalui musrenbang.	"Musrenbang dilaksanakan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan dan anggaran daerah."

No	Dokumen	Deskripsi Dokumen	Kutipan Dokumen
2	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	UU KIP mewajibkan badan publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi keuangan.	"Setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik."
3	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 6 Tahun 2016 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Perda ini mengatur partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan mekanisme pengawasan partisipatif.	"Masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran melalui musrenbang, dan berhak mengawasi pelaksanaan anggaran serta memberikan masukan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah."
4	Laporan Audit Internal Inspektorat Daerah Lampung Timur	Laporan ini berisi hasil audit internal terkait pelaksanaan anggaran dan temuan ketidaksesuaian yang dilaporkan oleh masyarakat.	"Terdapat beberapa temuan terkait ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan tindakan korektif yang sesuai."
5	Dokumen Musrenbang Kabupaten Lampung Timur	Dokumen ini mencatat proses musrenbang dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran daerah.	"Setiap tahun, sekitar 300 warga menghadiri berbagai tahapan musrenbang, dan banyak dari usulan mereka yang diakomodasi dalam anggaran."
6	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Keuangan	Survei ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap transparansi informasi keuangan yang disediakan oleh pemerintah daerah.	"Berdasarkan survei internal, sekitar 70% masyarakat puas dengan transparansi informasi yang kami sediakan melalui portal web https://lampungtimurkab.go.id/#dokumen ."
7	Dokumen Pelatihan dan Sosialisasi Penganggaran Partisipatif	Dokumen ini mencatat kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses anggaran.	"Pelatihan dan sosialisasi rutin dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses penyusunan anggaran dan hak mereka untuk berpartisipasi."
8	Laporan Evaluasi Program Pembangunan Daerah	Laporan ini mengevaluasi efektivitas program-program pembangunan yang didanai oleh anggaran daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat.	"Evaluasi menunjukkan bahwa program pembangunan yang didanai oleh anggaran daerah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, namun masih diperlukan peningkatan dalam partisipasi dan pengawasan oleh masyarakat."

Hasil Observasi

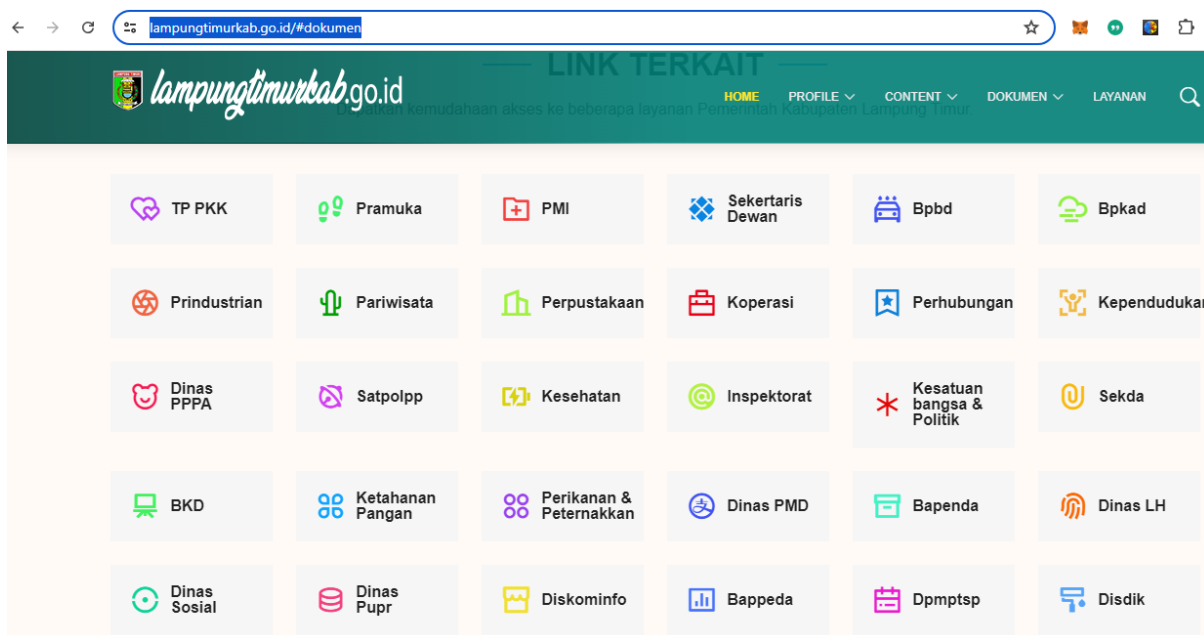
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran

Observasi kegiatan Musrenbang di Kecamatan Way Jepara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup aktif dengan sekitar 150 warga hadir dan memberikan usulan

terkait infrastruktur jalan, fasilitas air bersih, dan perbaikan sekolah. Diskusi berlangsung dinamis dengan perwakilan desa menyampaikan aspirasi mereka. Meskipun partisipasi tinggi, kesulitan dalam memahami teknis anggaran menjadi tantangan. Untuk mengatasi ini, tim fasilitator dari Bappeda memberikan penjelasan sederhana dan contoh kasus yang relevan. Beberapa warga juga menyampaikan perlunya pelatihan lebih lanjut mengenai penyusunan anggaran partisipatif.

Transparansi Informasi Keuangan

Observasi pada portal web <https://lampungtimurkab.go.id/> menunjukkan bahwa Provinsi Lampung Timur telah menyediakan informasi anggaran, realisasi belanja, dan laporan audit. Namun, akses dari desa terpencil seperti Desa Labuhan Maringgai terkendala oleh koneksi internet yang lemah, sehingga warga mengandalkan informasi dari pertemuan desa atau papan pengumuman. Warga yang memiliki akses ke portal web mengaku puas dengan keterbukaan informasi, namun mengusulkan agar laporan keuangan disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan meminta lebih banyak sosialisasi di desa-desa untuk mengajarkan cara mengakses dan memahami informasi keuangan.



Gambar 1. Portal Web Pemkab Lampung Timur

Pengawasan dan Evaluasi

Observasi pada forum evaluasi program pembangunan di Kecamatan Sukadana yang dihadiri warga, LSM, dan perwakilan pemerintah daerah menunjukkan bahwa warga menyampaikan kritik dan saran mengenai proyek infrastruktur yang dianggap belum optimal. Beberapa proyek mengalami keterlambatan dan kualitasnya kurang baik. Pemerintah daerah merespons dengan berjanji melakukan audit terhadap proyek-proyek tersebut dan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi selanjutnya, serta meningkatkan pengawasan lapangan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

Kesimpulan Observasi

1. Keterlibatan dalam Proses Penganggaran: Partisipasi masyarakat cukup baik, namun pemahaman teknis masih menjadi kendala. Diperlukan pelatihan lebih lanjut dan penggunaan bahasa yang sederhana dalam penjelasan teknis anggaran.
2. Transparansi Informasi Keuangan: Portal web pemkab menyediakan informasi yang lengkap, namun aksesibilitas di daerah terpencil perlu diperbaiki. Sosialisasi mengenai penggunaan portal juga perlu ditingkatkan.
3. Pengawasan dan Evaluasi: Forum evaluasi menunjukkan bahwa warga aktif dalam mengawasi dan memberikan feedback terhadap proyek pembangunan. Pemerintah perlu meningkatkan responsivitas dan tindakan korektif yang cepat.

Hasil observasi ini menunjukkan upaya nyata Pemda Lampung Timur dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi informasi, namun masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam edukasi dan penyederhanaan informasi.

Pembahasan

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran

a. Keterlibatan dalam Proses Penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Informan dari Pejabat Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa setiap tahun, sekitar 300 warga hadir dalam berbagai tahapan Musrenbang, dan banyak dari usulan mereka yang diakomodasi dalam anggaran. Namun, mereka juga mencatat bahwa partisipasi ini masih bisa ditingkatkan, terutama karena beberapa warga merasa suara mereka tidak akan didengar.

"Kami selalu berusaha melibatkan masyarakat dalam musrenbang. Setiap tahun, ada sekitar 300 warga yang hadir di berbagai tahapan musrenbang, dan banyak dari usulan mereka yang diakomodasi dalam anggaran. Namun, partisipasi ini masih bisa ditingkatkan. Kadang, masyarakat merasa enggan untuk ikut karena mereka berpikir suara mereka tidak akan didengar" (Informan 1).

Kepala Bagian Anggaran menambahkan bahwa partisipasi dari komunitas terpencil masih kurang: "Masyarakat memang diundang dalam forum anggaran, namun partisipasinya masih bisa ditingkatkan. Banyak usulan masyarakat yang disetujui, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti infrastruktur dan pendidikan. Tapi, partisipasi dari komunitas terpencil masih kurang" (Informan 2).

Dokumen resmi seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendukung keterlibatan masyarakat dalam penganggaran melalui Musrenbang, yang dirancang sebagai forum partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran. UU ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Observasi di Kecamatan Way Jepara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cukup aktif dengan sekitar 150 warga hadir dan memberikan usulan terkait infrastruktur jalan, fasilitas air bersih, dan perbaikan sekolah. Namun, masih ada tantangan dalam memahami teknis anggaran, sehingga tim fasilitator dari Bappeda perlu memberikan penjelasan yang sederhana dan menggunakan contoh kasus yang relevan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam penganggaran untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran. Menurut (Hasan, 2018), partisipasi

masyarakat dalam penganggaran dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran publik dengan melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pemerintah.

b. Kualitas Partisipasi

Wawancara dengan pejabat pemerintah daerah dan perwakilan LSM menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mulai memahami proses anggaran, mereka masih membutuhkan bimbingan dalam menyusun usulan yang realistis dan berdampak besar. Misalnya, Auditor APIP menyebutkan bahwa masyarakat masih butuh bimbingan dalam menyusun usulan yang realistis:

"Kami mengamati bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya partisipasi dalam anggaran, tetapi mereka masih butuh bimbingan dalam menyusun usulan yang realistis dan berdampak besar" (Informan 3).

Perwakilan LSM juga menyatakan bahwa kualitas partisipasi cukup baik tetapi masih ada ruang untuk perbaikan:

"Kualitas partisipasi cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Masyarakat perlu lebih banyak informasi dan pendidikan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses penganggaran" (Informan 5).

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 6 Tahun 2016 menekankan pentingnya partisipasi yang berkualitas, dengan menetapkan standar kualitas partisipasi yang inklusif dari berbagai kelompok masyarakat. Observasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang teknis anggaran masih menjadi kendala, sehingga diperlukan pelatihan lebih lanjut dan penggunaan bahasa yang sederhana dalam penjelasan teknis anggaran. Penelitian oleh Dzgoeva & Romanov (2023) mengidentifikasi bahwa pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan motivasi partisipasi publik dalam proses anggaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

Pengawasan dan Evaluasi

Pejabat pemerintah daerah dan LSM menyatakan bahwa pengawasan oleh masyarakat sangat membantu dalam mengidentifikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek. DPRD sering mengadakan pertemuan evaluasi dengan warga, yang memberikan feedback yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan:

"DPRD sering mengadakan pertemuan dengan warga untuk evaluasi program. Feedback dari masyarakat sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, tidak semua masukan bisa segera diimplementasikan karena keterbatasan anggaran" (Informan 4).

LSM juga aktif mengawasi pelaksanaan anggaran dan menemukan beberapa ketidaksesuaian yang telah dilaporkan ke pemerintah daerah, meski beberapa masalah memerlukan waktu lama untuk diselesaikan:

"LSM kami aktif mengawasi pelaksanaan anggaran. Kami menemukan beberapa ketidaksesuaian yang sudah kami laporkan ke pemerintah daerah, dan mereka cukup responsif. Namun, beberapa masalah memerlukan waktu lama untuk diselesaikan" (Informan 5).

Laporan audit inspektorat menunjukkan bahwa temuan terkait ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran yang dilaporkan oleh masyarakat telah ditindaklanjuti dengan tindakan

korektif yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan partisipatif yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 berfungsi dengan baik. Dzusova (2023) menyimpulkan bahwa partisipasi publik paling efektif pada tahap awal dan akhir proses anggaran, yaitu pada tahap perencanaan dan pemantauan pelaksanaan program.

Transparansi Informasi

a. Aksesibilitas Informasi Keuangan Publik

Website resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi melalui beberapa fitur:

1. Publikasi Dokumen Publik: Situs ini menyediakan berbagai dokumen strategis seperti RENSTRA (Rencana Strategis) dan keputusan penting yang dapat diunduh oleh publik.
2. Transparansi Kinerja: Informasi kinerja daerah dipublikasikan secara terbuka, memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menilai.
3. Pelayanan Publik Online: Berbagai layanan online disediakan, termasuk informasi kesehatan, investasi, kependudukan, dan pariwisata.

Secara keseluruhan, website ini mencerminkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Aksesibilitas informasi keuangan publik di Kabupaten Lampung Timur telah ditingkatkan melalui portal web <https://lampungtimurkab.go.id/>, yang menyediakan informasi untuk masyarakat. Namun, masih ada keluhan tentang keterbatasan akses di daerah terpencil yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai:

"Kami terus memperbarui portal data terbuka setiap bulan. Informasi anggaran, pengeluaran, dan laporan audit semuanya bisa diakses oleh masyarakat. Tapi, kami masih menerima keluhan tentang kesulitan akses bagi warga di daerah terpencil" (Informan 9).

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga mewajibkan badan publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi keuangan. Observasi di beberapa desa terpencil seperti Desa Labuhan Maringgai menunjukkan bahwa koneksi internet yang lemah menghambat akses informasi. Warga desa mengandalkan informasi yang disampaikan melalui pertemuan desa atau papan pengumuman. Bisogno et al., (2022) menemukan bahwa inisiatif e-government dan e-participation berkontribusi pada peningkatan transparansi anggaran, terutama di daerah yang memiliki akses internet yang memadai.

b. Kualitas Informasi Keuangan

Kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, meski ada rekomendasi untuk penyederhanaan laporan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat (Laporan dari Inspektorat Daerah). Akademisi juga menyarankan bahwa penyederhanaan bahasa dalam laporan keuangan akan membantu masyarakat umum untuk lebih mudah memahami informasi yang disediakan:

"Kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan sudah cukup baik dan sesuai dengan standar. Namun, penyederhanaan bahasa dalam laporan akan membantu masyarakat umum untuk lebih mudah memahami" (Informan 10).

Yang Dezhi (2018) menekankan pentingnya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi keuangan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses anggaran.

c. Persepsi dan Kepuasan Masyarakat

Hasil survei kepuasan masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap transparansi informasi keuangan. Sekitar 70% masyarakat puas dengan transparansi informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah (Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Keuangan). Namun, masih ada permintaan untuk peningkatan edukasi dan pelatihan tentang cara mengakses dan memahami informasi keuangan. Marini Mahyani Nasution & Achmad Lutfi (2022) menyoroti tantangan dan manfaat dari keterlibatan publik dalam pengungkapan anggaran, mencatat bahwa meskipun ada tantangan, keterlibatan publik dapat meningkatkan pengumpulan pajak dan kepuasan dalam layanan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Timur telah mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dalam tata kelola keuangan publik. Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran melalui Musrenbang telah menunjukkan peningkatan partisipasi dan kualitas masukan yang lebih baik, meskipun masih terdapat kendala dalam partisipasi dari komunitas terpencil dan pemahaman teknis anggaran. Transparansi informasi keuangan publik juga telah ditingkatkan melalui portal web pemerintah kabupaten Lampung Timur, meski aksesibilitas di daerah terpencil masih perlu diperbaiki. Keterbatasan akses internet di daerah terpencil menghambat masyarakat dalam mengakses informasi keuangan publik melalui portal tersebut. Selain itu, masyarakat masih memerlukan bimbingan dan edukasi lebih lanjut untuk memahami teknis anggaran dan menyusun usulan yang realistis dan berdampak. Partisipasi dari kelompok marginal dan komunitas terpencil juga masih kurang, sehingga representasi yang inklusif belum sepenuhnya tercapai.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dapat menghasilkan keputusan anggaran yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transparansi informasi keuangan yang lebih baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mendorong akuntabilitas publik. Edukasi yang lebih baik tentang proses anggaran dan penggunaan portal informasi keuangan sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dalam pengawasan anggaran publik. Sebagai saran, pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur internet di daerah terpencil untuk memastikan akses yang merata terhadap informasi keuangan publik. Program pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses penganggaran dan teknis anggaran. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk melibatkan kelompok marginal dan komunitas terpencil dalam proses penganggaran, termasuk melalui pendekatan yang lebih inklusif dan representatif. Selain itu, pengawasan oleh masyarakat harus terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

- Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation. *Perspektif Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & Santis, S. (2022). Do e-government initiatives and e-participation affect the level of budget transparency? *International Public Management Journal*, 25(3). <https://doi.org/10.1080/10967494.2022.2042437>
- Bovens, M., Schillemans, T., & Hart, P. T. (2008). Does public accountability work? An assessment tool. *Public Administration*, 86(1). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2008.00716.x>
- Dezhi, Y. (2018). *On public participation in local budget*. <https://doi.org/10.2991/icpm-18.2018.25>
- Dzgoeva, D. T., & Romanov, I. S. (2023). Public Participation in the Budget Process: Theory and Methodology. *Administrative Consulting*, 11. <https://doi.org/10.22394/1726-1139-2023-11-114-121>
- Dzusova, S. (2023). Mechanisms for the involvement and participation of citizens in the budget process. *Management and Business Administration*, 2. <https://doi.org/10.33983/2075-1826-2023-2-74-84>
- Faedlulloh, D., & Wiyani, F. (2019). Promote Good Governance in Public Financial: The Practice of Local Budget (APBD) Transparency Through Open Data Jakarta in Jakarta Provincial Government. *Jurnal Good Governance*, 15(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.41>
- Fox, J., & Fox, J. (2007). Development in Practice The uncertain relationship between transparency and accountability The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4/5).
- Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. *Public Administration Review*, 75(4). <https://doi.org/10.1111/puar.12361>
- Hartanti, N., & Yuhertiana, I. (2018). Transparency, accountability and responsibility in an Indonesia village financial management. *Public Policy And Adminsitration Research*, 8(3).
- Hasan, S. (2018). Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). *Jurnal Meraja*, 1(3).
- Hood, C. (2012). Transparency in Historical Perspective. In *Transparency The Key to Better Governance?* <https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263839.003.0001>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4). [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2). <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. R. (2000). Investor protection and corporate governance: Origins, Consequences, Reform. *Journal of Financial Economics*, 58(1-2).
- Liu, C., & Mikesell, J. L. (2014). The Impact of Public Officials' Corruption on the Size and Allocation of U.S. State Spending. *Public Administration Review*, 74(3), 346-359. <https://doi.org/10.1111/puar.12212>
- Marini Mahyani Nasution, & Achmad Lutfi. (2022). Public Involvement in Budget Transparency in terms of Opportunities and Challenges. *Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal*, 12(2). <https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.7704>

- Mudrifah, M. (2020). Public Governance and Financial Performance of Indonesian Local Governments: Evidence from Multiple Stakeholder Perspectives. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 2(3). <https://doi.org/10.33122/ijase.v2i3.162>
- Natawibawa, I. W. Y., Mulya, I. M. O., & Yoh, W. H. (2019). TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY AS DETERMINANTS IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF UNIVERSITIES: A STUDY ON STATE UNIVERSITIES IN MALANG CITY. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i1.247>
- Natison, A., Esien, E. B., Harjo, D., Agoestyowati, R., & Lestari, P. A. (2022). The Effect of Public Accountability and Transparency on State Financial Management Mechanism: A Quantitative Method Analysis. *Ilomata International Journal of Social Science*, 3(1). <https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.433>
- Nuryani, & Firmansyah, A. (2020). Determinants of transparency in financial management on local government websites: Evidence from Indonesia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(2). <https://doi.org/10.18488/JOURNAL.73.2020.82.145.155>
- Savitri, E., Andreas, A., Diyanto, V., & Gumanti, T. A. (2022). ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN RIAU PROVINCE. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14(2). <https://doi.org/10.23969/jrak.v14i2.5550>
- Shah, A. (2005). Public Sector Governance and Accountability Series, Public Services Delivery. In *OCLC Systems & Services* (Vol. 8, Issue 5).
- Suryanto, S. (2019). Analysis of Regional Financial Information Systems As A Media of Regional Financial Management Transparency in Indonesia. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 662(2). <https://doi.org/10.1088/1757-899X/662/2/022080>
- Trimarstuti, J. (2019). Transparency and Public Accountability Through Public Sector Accounting: The Use of 'Value For Money' Concept in Indonesia. *International Journal of Engineering Technology and Natural Sciences*, 1(1). <https://doi.org/10.46923/ijets.v1i1.14>
- Zen Munawar, Novianti Indah Putri, Rita Komalasari, Iswanto, Hernawati, & Andina Dwijayanti. (2023). Program Desa Cerdas Untuk Mendukung Keberlangsungan Rencana Strategis Desa. *Darma Abdi Karya*, 2(1). <https://doi.org/10.38204/darmaabdikarya.v2i1.1345>